

BAB I

PENDAHULUAN

Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II Kabupaten Way Kanan, Dati II Kabupaten Lampung Timur dan Dati II Kota Madya Metro yang disahkan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta sebagaimana dimaklumi bahwa kota merupakan pusat konservasi penduduk dengan segala aktifitasnya baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Kota Metro sebagaimana dengan kota lainnya memiliki permasalahan kota yang relatif sama walaupun intensitasnya berbeda seperti permasalahan dalam kota, lingkungan sanitasi persampahan, drainase, air bersih, kepentingan masyarakat yang menimbulkan kesemerawutan, pencemaran dan permasalahan-permasalahan lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup akan mengupayakan memperbaiki sistem pengelolaan dan sistem pelayanan serta melengkapi fasilitas kota baik fasos maupun fasum.

Dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan dan pembangunan (the United Nation Convergence On Environment and Development –UNCED) di Rio De Janeiro Tahun 1992 telah menghasilkan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan dalam agenda 21 tentang informasi bagi pengambil keputusan, telah menggaris bawahi perlunya kemampuan pemerintahan baik daerah maupun nasional dalam mengumpulkan pemanfaatan data dan informasi multi sektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan pemerintah baik nasional maupun daerah untuk menyediakan informasi lingkungan hidup dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah (Propinsi/ Kabupaten/ Kota).

Dengan meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (GOOD Environmental) diharapkan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian lingkungan hidup.

Dari kesepakatan Negara-Negara Asia Pasifik dan amanat Undang-Undang tersebut diatas, maka sejak tahun 2002 pada tingkat nasional telah diterbitkan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) setiap tahun, sementara untuk Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup kepada daerah untuk menyusun laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), dengan mengacu kepada pedoman umum penyusunan laporan SLHD yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

I.1. Tujuan Penulisan Laporan

- a. Menyediakan data, informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek dan daya tampung lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
- c. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan kepentingan penanaman modal (investor).
- d. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (Good Environmental Governance) di daerah serta sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersama – sama dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

I.2. Isu-Isu Lingkungan Hidup

Kajian lingkungan strategis menghasilkan banyak isu, tetapi sesuai dengan sifatnya perencanaan strategis menganjurkan bahwa tidak semua isu (permasalahan) perlu diatasi, dilihat dari bentuk isu. Sebab perencanaan strategis hanya mengatasi beberapa isu-isu atau permasalahan yang utama (strategis) saja karena ketersediaan sumber daya untuk mengatasi permasalahan juga terbatas. Norris dan Pauton (1991) menyebutkan bahwa, isu-isu strategis adalah isu-isu yang berkaitan dengan keterkaitan antara organisasi yang dikaji dengan lingkungannya (internal dan eksternal), yang isu-isu tersebut banyak mempengaruhi organisasi tersebut, maka semua isu strategis adalah penting, tetapi tidak semua isu penting adalah strategis.

Dengan berlandaskan Visi Pembangunan Kota Metro yang dipadukan dengan kajian secara mendalam terhadap arah pembangunan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun yang akan datang, permasalahan pembangunan yang akan dihadapi termasuk memperhatikan perkembangan kebutuhan, tuntutan, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, maka disusunlah rumusan isu-isu Strategis Pembangunan Kota Metro sebagai berikut :

Tabel. 1.1. Isu – Isu Strategis Pembangunan Kota Metro

No	Bidang Strategis	Isu-Isu Strategis
1	2	3
1	Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan fisik kota - Penyediaan fasilitas perkotaan - Penataan lingkungan pemukiman - Penataan dan pemeliharaan asset daerah - Pengendalian pemanfaatan ruang
2	Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana peribadatan - Kualitas pemahaman dan pengamatan ajaran agama - Kerukunan hidup umat beragama
3	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana pendidikan - Tenaga pendidik an - Mutu Pendidik an - Managem ent pendidik an
4	Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kesejahteraan penduduk - Angka Kemiskinan - Tingkat pengangguran - Ketersediaan lapangan kerja
5	Perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan ekonomi - Pendapatan daerah - Pengembangan perekonomian - Pengembangan pertanian/ agro politan
6	Lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas lingkungan hidup - Pembangunan berkelanjutan
7	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Derajat kesehatan dan gizi - Kesejahteraan sosial
8	Kualitas aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja aparatur - Saran prasarana aparatur
9	Partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat partisipasi dalam pembangunan disegala bidang - Partisipasi masyarakat dalam dunia usaha - Pemberdayaan masyarakat
10	Otonomi daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pemerintahan - Pemantapan Otonomi Daerah - Perkuatan Kecamatan dan Kelurahan

Berdasarkan isu-isu strategis diatas, masalah lingkungan hidup yang perlu diatasi di Kota Metro adalah peningkatan pelestarian lingkungan hidup melalui rehabilitasi daerah tangkapan air, konservasi daerah aliran dan bantaran sungai.

Dengan demikian masalah lingkungan hidup ini pada hakekatnya menyangkut masalah kuantitas dan kualitas air sungai serta sumber daya lahan yang terangkum dalam isu-isu utama lingkungan hidup sebagai berikut :

a. Sumber Daya Air dan Sungai

- Potensi terjadinya pencemaran pada badan air sungai akibat aktivitas industri, domestik dan aktifitas rumah tangga.
- Potensi terjadinya erosi pada DAS terutama pada hulu sungai.
- Potensi terjadinya sedimentasi (pengendapan) pada hilir sungai.

b. Sumber Daya Lahan

Adanya kecenderungan meluasnya lahan kritis yang ditandai dengan menurunnya kualitas kesuburan tanah, terjadinya kerusakan lahan produktif, adanya alih fungsi lahan dan pencemaran lahan produktif akibat pemakaian pestisida dan pupuk yang berlebihan.

c. Terganggunya kehidupan dan populasi keanekaragaman hayati serta menyusutnya luas daerah tangkapan air karena pemanfaatan/ peruntukan lahan tidak sesuai dengan fungsinya.

1.3. Kebijakan Pengelolaan dan Pendanaan Lingkungan

A. Kebijakan pembangunan lingkungan hidup

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup yang tertuang dalam Misi pembangunan Kota Metro adalah meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri pada hakekatnya dilaksanakan atas dasar kesejahteraan masyarakat serta keadilan dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang dengan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur dan melaksanakan proteksi atau perlindungan terhadap sumber daya alam yaitu udara, tanah, air, pesisir dan laut, keanekaragaman hayati, pedesaan, perkotaan dan lingkungan sosial agar tidak mengalami kerusakan atau pencemaran, maka arah pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup harus memperhatikan daya dukung, daya tampung dan produktifitas lingkungan hidupnya.

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam Pasal 4 (empat) undang-undang tersebut adalah :

1. Terciptanya keselarasan, keserasian dan kesinambungan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup.
3. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dengan generasi masa depan.
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Kebijakan yang di tempuh dalam rangka pembangunan lingkungan hidup adalah peningkatan pelestarian dan pengendalian lingkungan hidup. Sedangkan program kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan dalam upaya menterjemahkan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup adalah :

1. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
2. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
3. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
4. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.
5. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Peningkatan dan pengendalian polusi.
7. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
8. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

B. Arah kebijakan umum

1. Kebijakan Umum Bidang Pendidikan
 - Terwujudnya kualitas SDM di masyarakat melalui jenjang pendidikan formal dan non formal.
 - Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.
2. Kebijakan Umum Bidang Keagamaan
 - Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan lembaga agama.
3. Kebijakan Umum Bidang Kesehatan
 - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pelayanan dan penyuluhan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
4. Kebijakan Umum Bidang Kependudukan
 - a. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberikan bantuan penyediaan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Meningkatkan kualitas SDM pencari kerja guna mempersiapkan tenaga kerja yang profesional, handal dan siap pakai (kerja).

5. Kebijakan Umum Bidang Lingkungan Hidup
Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diimbangi dengan pengembangan sistem dan mekanisme pengembangan SDA.
 6. Kebijakan Umum Bidang Perkotaan
 - a. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik guna mendorong pemerataan pembangunan, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta penanganan dampak bencana alam.
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan dan penataan ruang kota.
 - c. Meningkatkan mutu hasil penelitian dan pendataan guna menunjang perencanaan dan pengembangan pembangunan daerah.
 7. Kebijakan Umum Perekonomian Daerah
 - a. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang didukung oleh pembangunan industri, peningkatan pemanfaatan dan penguasaan teknologi.
 - b. Meningkatkan kemampuan dan produktifitas usaha melalui optimisasi sumber daya pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain.
 - c. Mengembangkan pertanian dengan wawasan bisnis, menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian.
 - d. Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan dan perkoperasian.
 - e. Pengembangan iklim investasi pembukaan penanaman modal dan pengembangan perusahaan daerah
 8. Kebijakan Umum Bidang Kualitas Aparatur.
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui penataan kelembagaan manajemen publik dan peningkatan kapasitas SDM aparat ur.
 9. Kebijakan Umum Bidang Otonomi Daerah
Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.
 10. Kebijakan Umum Bidang Partisipasi Masyarakat
 - a. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - b. Meningkatkan sumber daya perempuan dan pemenuhan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
 - c. Pengembangan kreatifitas kepemudaan dan dah raga.
- C. Kebijakan Tata Ruang Kota Metro
Rencana struktur tata ruang merupakan pedoman dasar bagi pengembangan suatu wilayah kawasan tertentu yang selanjutnya akan menunjukkan pada tata ruang yang sesuai dengan fungsinya yang lebih berorientasi pada pelayanan umum dan

pemenuhan kebutuhan warga kota dalam kaitannya dengan usaha meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

Penyusunan rencana struktur ruang pada masing-masing wilayah pengembangan kota akan memberikan manfaat terpenuhinya tujuan dan sasaran pengembangan wilayah, pengembangan kota antara lain :

- Menyerahkan tingkat perkembangan masing-masing wilayah bagian kota sesuai dengan potensi yang dimiliki serta proposional dengan fungsi yang akan dikembangkan dimasa yang akan datang.
- Mengatur mekanisme perkembangan dan penentuan fungsi yang direncanakan, yang tercermin dari intensitas fisik, sehingga diharapkan dapat menunjang perkembangan kota secara optimal.
- Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah dalam wilayah pengembangan fisik, khususnya dengan sarana dan prasarana kota. Dengan demikian akan mempercepat pertumbuhan dan perambatan perkembangan kota akan lebih terarah.
- Memberi pedoman bagi peruntukan lahan yang berkaitan dengan fasilitas dan utilitas kota sehingga dapat menunjang fungsi masing-masing wilayah pengembangan kota.

Arah umum kebijakan struktur pertumbuhan pada wilayah perencanaan adalah :

- a. Mengurangi beban kegiatan kota dibagian tengah dengan menyebarkannya ke bagian utara dan selatan.
- b. Memperluas wilayah pelayanan perkotaan dan regional, dan mempertahankan intensitas permukiman eksisting.
- c. Membuka jalur akses keluar wilayah perencanaan untuk mempercepat terbentuknya struktur pertumbuhan wilayah perencanaan.
- d. Menata kembali jalur jalan, khususnya yang telah ditetapkan sebagai jalan arteri dan kolektor, sehingga memenuhi ketentuan sempadan jalan yang ditetapkan.
- e. Menata kembali jalur air permukaan khususnya yang telah ditetapkan sebagai saluran drainase primer dan sekunder, sehingga memenuhi ketentuan sempadan saluran yang ditetapkan.
- f. Menata kembali tata bangunan, khususnya bangunan pada pusat-pusat pelayanan sehingga memenuhi persyaratan teknis bangunan dan ketentuan sempadan bangunan.
- g. Menata kembali kebijaksanaan tata ruang wilayah Kota Metro yang mengakomodasi kebijakan pertanahan yaitu penataan penguasaan tanah, penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah.

h. Menetapkan pusat-pusat pelayanan yang didasarkan pada skala pelayanan yaitu :

- Pusat pelayanan skala regional/ inter regional
- Pusat pelayanan skala kota
- Pusat pelayanan skala lingkungan.

Permukiman perkotaan pada pelayanan ini dikembangkan disetiap bagian wilayah pengembangan dan ditetapkan kelurahan yang memiliki keterkaitan satu sama lain untuk berperan dan berkembang sebagai pertumbuhan baru disetiap wilayah pengembangan.

i. Memperbaiki struktur kegiatan perkotaan diseluruh bagian kota dan menentukan fungsi wilayah pembangunan sebagai berikut :

- Pusat pelayanan skala kota
- Pusat permukiman
- Pusat wisata kota
- Pusat pelayanan skala regional

j. Menentukan sruktur baru kegiatan kota diseluruh wilayah pengembangan.

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah, karena itu pengembangan wilayah Kota Metro harus disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh wilayah itu sendiri.

Pengembangan wilayah pada dasarnya berorientasi pada main issue wilayah yang saling berkaitan.

Konsep pengembangan wilayah di Kota Metro diarahkan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antara wilayah yang bertujuan untuk mengurangi disprioritas antar wilayah Kecamatan dan menyatukan arah orientasi pembangunan dan pengembangan wilayah melalui pendekatan struktur ruang-ruang kawasan interaktif dan berbasis pada potensi sumber daya alam.

Konsep keseimbangan wilayah memiliki arti setiap wilayah yang ada di kawasan perencanaan memiliki kesempatan yang relatif sama untuk tumbuh dengan memanfaatkan berbagai rangsangan yang ada seperti bermunculannya lingkungan perumahan baru dan kebijakan sosial ekonomi lainnya.

D. Kebijakan Sosial, Ekonomi, Budaya

Konsep mikro dalam kebijakan pengembangan Kota Metro mencakup kosep dalam 3 (tiga) kebijakan sosial, ekonomi, budaya.

1. Kebijakan sosial

- Mengurangi kesenjangan hubungan antar bagian wilayah Kota Metro

- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pada wilayah-wilayah yang jauh dari tepi sungai dan terpencil sehingga kesenjangan dis prioritas yang telah terbentuk dapat berkurang.
- Dengan berkembangnya keanekaragaman suku bangsa yang ada di wilayah Kota Metro sebagai akibat dari perkembangan penduduk yang pesat pada hakikatnya akan mempengaruhi kegiatan sosial masyarakat.
- Dengan adanya perbedaan status, latar belakang, sosial, ekonomi, budaya, agama, pendidikan maupun ekonomi dapat berpotensi sebagai pemicu konflik bahkan berpotensi sebagai salah satu faktor disintegrasi.

2. Kebijakan ekonomi

Sehubungan pesatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kota Metro menunjukkan peningkatan setiap tahun, pertumbuhan ekonomi Kota Metro mencapai 6,74 % setiap tahunnya.

Sektor penunjang lajunya perekonomian Kota Metro, adalah sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor transportasi dan komunikasi.

3. Kebijakan Budaya

Pemerintah Kota Metro telah menetapkan beberapa kebijakan yang akan ditempuh adalah :

- Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya daerah
- Memfasilitasi kesenian dan budaya lainnya, sarana dan prasarana sehingga diharapkan kedepan budaya yang ada di Kota Metro lebih maju dan lebih baik lagi.
- Untuk menunjang lajunya budaya di Kota Metro perlu meningkatkan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta kebebasan berpolitik.
- Yang tidak kalah pentingnya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.

Program indikatif yang dilakukan adalah :

- Pengembangan nilai-nilai budaya
- Pengelolaan kekayaan dan keanekaragaman budaya
- Pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya
- Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Pemeliharaan ketertiban dan pencegahan tindak kriminal.
- Pengembangan wawasan berkebangsaan
- Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- Meningkatkan pembrantasan penyakit masyarakat (pekat).
- Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

- Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
- Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- Pembinaan anak terlantar, penyandang cacat dan eks penyandang penyakit sosial (narapidana, PSK, narkoba) dan penyakit sosial lainnya.
- Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- Penyiapan potensi sumber daya dan pra sarana daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM

II.1. Visi dan Misi Kota Metro

A. Visi Pembangunan Jangka Menengah

Visi dalam membangun Kota Metro ke depan selama 5 (lima) tahun adalah :“Terwujudnya Kota Metro sebagai Kota Pendidikan yang asri, maju, makmur, aman dan demokratis”.

Visi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan berarti menjadikan daerah ini sebagai sentra pendidikan di Propinsi Lampung yang mempunyai daya tarik dan daya saing, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Kota yang asri berarti pembangunan yang dilakukan didasarkan pada pelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup.

Maju berarti terjadinya percepatan pembangunan dengan didukung pendidikan yang komprehensif, seimbang antara “Iptek” dan “Imtak”.

Makmur berarti perekonomian yang menjamin pemerataan kesejahteraan rakyat dan menyediakan kesempatan kerja

Aman berarti pembangunan dilaksanakan dalam suatu kondisi dimana aparaturnya Pemerintah Daerah dan masyarakat menjunjung tinggi hukum, bersatu, rukun dan damai.

Demokratis berarti penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada prinsip – prinsip demokratis, mengedepankan peran serta masyarakat sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang partisipatoris dan egaliter.

B. Misi Pembangunan Jangka Menengah

Suatu misi tidak akan berarti bila tidak dioperasionalkan. Operasional visi tersebut diwujudkan dalam bentuk misi yang selengkapnyanya digambarkan di bawah ini :

1. Membangun sumber daya manusia yang bertaqwa, berkualitas, profesional, unggul, berdaya saing, berahlak mulia melalui sistem pendidikan yang terarah dan komprehensif.

Pelaksanaan misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan, membangun sumber daya manusia yang bermoral, berkualitas, profesional, unggul dan berdaya saing sangat ditentukan sistem pendidikannya. Sumber daya manusia yang baik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan itu sendiri, oleh karenanya misi ini ditujukan untuk membangun kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan perluasan cakupan pendidikan. Hal yang akan dicapai adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan kewirausahaan dengan didukung perbaikan kesehatan dan kesejahteraan.

2. Menciptakan keseimbangan pembangunan kota dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan ini ditujukan untuk menghilangkan ketimpangan pembangunan di segala bidang sekaligus pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

Keberhasilan misi ini ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat oleh karena itu perwujudan misi ini akan dimulai dari membangun komitmen bersama, membangun kesadaran semua lapisan masyarakat dan aparat pemerintah, kebijakan dan perencanaan tata ruang dipadukan dengan program pelestarian lingkungan hidup.

3. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berbasis perdagangan dan agro industri, memperbaiki iklim usaha, menarik investasi dan penyediaan lapangan kerja.

Misi ini ditujukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perwujudan kesejahteraannya, pembangunan dan pengoptimalan seluruh potensi ekonomi daerah harus terus dilanjutkan dengan upaya mensinergikan seluruh potensi pelaku ekonomi, dunia usaha, lembaga keuangan dan kelembagaan lainnya, potensi pertanian, jasa, dan perdagangan akan tetap menjadi prioritas dengan didukung pembangunan pada sektor yang lalu dimana antara sektor tersebut harus saling terkait dan mendukung.

4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka tata pemerintahan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, profesional, efisien dan efektif, berkeadilan serta taat pada aturan-aturan hukum. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan iklim yang kondusif dalam mengemban tugas-tugas Pemerintahan Daerah guna lebih mewujudkan tingkat kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas.

5. Mewujudkan kehidupan demokrasi dalam segala aspek kehidupan, menjunjung tinggi dan menghormati hak azasi manusia, menjunjung tinggi hukum dan menjamin tegaknya supremasi hukum.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pembangunan, sebab masyarakat adalah subyek dari pembangunan itu sendiri. Selain juga untuk menciptakan rasa aman, nyaman, tertib dan tentram supaya hak-hak dasar masyarakat tidak terlanggar dengan menjunjung tinggi hukum sehingga hukum menjadi panglima di dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya.

6. Membangun serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur guna mendukung pembangunan daerah Kota Metro memiliki keunggulan karena lokasi yang strategis di tengah-tengah wilayah propinsi, sehingga menjadi penghubung dari dan ke berbagai daerah lain serta dapat menarik pergerakan penduduk baik dari maupun diluar wilayah Kota Metro.

Oleh karena itu kondisi fisik terutama infrastruktur sangat menentukan pembangunan Kota Metro di masa mendatang untuk mendukung kelancaran arus pertukaran barang, jasa bahkan sumber daya manusia dan sekaligus memperbesar kapasitas aliran arus tersebut.

Dengan demikian hasil pembangunan dapat dipasarkan atau didistribusikan secara lebih lancar, efektif dan efisien.

7. Mewujudkan kemandirian rakyat melalui prinsip-prinsip otonomi di era reformasi dan globalisasi.

Kemandirian masyarakat sangat menentukan percepatan hasil-hasil pembangunan dimulai dengan meningkatkan kapasitasnya melalui penciptaan akumulasi modal dan surplus yang dihasilkan, yang pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan untuk dinikmati masyarakat.

Proses transformasi akan berjalan dengan efektif dan efisien hanya jika digerakkan oleh masyarakat yang mandiri.

Pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat perlu di prioritaskan terutama mulai dari keluarga tidak mampu, baik dengan peningkatan sumber daya manusianya maupun peningkatan pemodalannya yang dilakukan secara bertahap, terus-menerus, terpadu didasarkan kepada kemandiriannya.

II.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi dan misi serta isu-isu yang berkembang maka program prioritas pembangunan daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2008 adalah :

A. Pembangunan Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangan besar bagi pembangunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Program peningkatan produksi tanaman pangan di Kota Metro diarahkan kepada peningkatan produksi padi dan palawija. Dengan bantuan irigasi teknis sebagian besar petani dikutsertakan dalam kegiatan intensifikasi pertanian. Disamping itu, pemerintah memberi dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian yang berupa benih, pupuk dan pestisida. Secara umum jenis tanaman pangan di Kota Metro terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Sedang prosentase pertumbuhan produktifitas dan produksinya mengalami pertumbuhan positif kecuali untuk produksi ubi kayu. Kondisi ini dapat

menjelaskan bahwa selama periode tersebut terjadi alih fungsi lahan di Kota Metro dari lahan pertanian menjadi non pertanian.

Sementara untuk meningkatkan produksi pertanian dilakukan berbagai bentuk program intensifikasi peningkatan produktivitas hasil pertanian tersebut perlu terus dilakukan, disamping ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian juga agar pendapatan petani semakin meningkat.

B. Pembangunan di Bidang Peternakan

Sub Sektor di Bidang Peternakan meliputi usaha pemeliharaan semua jenis ternak (besar dan kecil) dan unggas, baik bertujuan untuk dikembangbiakkan, dipotong maupun untuk dimanfaatkan hasil-hasilnya.

populasi ternak di Kota Metro Tahun 2008 ± 690.997 ekor.

C. Pengembangan Pembangunan di Bidang Industri

Pengembangan pembangunan di Bidang Industri di Kota Metro ditujukan untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih kokoh, meningkatkan nilai tambah produksi pertanian, serta untuk meningkatkan dan memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja.

Perkembangan industri di Kota Metro relatif pesat, khususnya industri kecil dan industri rumah tangga. Jumlah unit usaha dan pertumbuhan industri di Kota Metro dapat dilihat pada Basis Data.

D. Pengembangan Pembangunan di Bidang Pendidikan.

Untuk mendukung visi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan maka berbagai program peningkatan fasilitas pendidikan telah dilakukan dengan sarana pendidikan yang lengkap serta didukung oleh suasana kota yang tenang dan tentram akan meningkatkan daya tarik para pelajar dari luar daerah menuntut ilmu di Kota Metro meskipun demikian, upaya yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi harapan seluruh komponen masyarakat, karena adanya prioritas-prioritas pembangunan dan keterbatasan sumber biaya yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Metro.

E. Pembangunan di Bidang Kesehatan

Pembangunan di Bidang Kesehatan diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan dan kualitas kesehatan pada masyarakat Kota Metro. Semakin tinggi tingkat kesehatan mencerminkan tingkat pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

F. Pembangunan di Bidang Peribadatan

Pembangunan pada sektor agama memegang peranan penting dalam pembentukan moral, etika, spiritual dan akhlak masyarakat. Masyarakat yang berkualitas juga ditentukan dengan adanya keseimbangan antara segi intelektual dan segi keimanan. Agama mengajarkan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan keseimbangan baik manusia sebagai pribadi maupun hubungan dengan masyarakat.

II.3. Kondisi Geografis, demografis, geologi, tata ruang, kependudukan dan kesehatan masyarakat.

Kota Metro yang mempunyai luas 68,74 km² berada di tengah-tengah wilayah Propinsi Lampung memiliki kelebihan tersendiri karena menjadi penghubung ke semua arah dengan jalur jalan propinsi dan jalur Kabupaten berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa terdapat ketergantungan pada skala kota wilayah dan interregional di dalam wilayah perencanaan; ketergantungan ini lebih didasarkan pada ketersediaan penduduk pendukung dalam jumlah tertentu dalam pengadaan sarana dan prasarana perkotaan. Hal ini terutama dikaitkan dengan keberadaan Kota Metro sebagai kota orde kedua di bawah kota Bandar Lampung yang menduduki orde pertama dalam sistem kota. Sedangkan dalam skala regional, Kota Metro merupakan wilayah belakang/Hinter land dari Kota Bandar Lampung. Kondisi ini didukung oleh keberadaan kota yang relatif dekat dengan Kota Bandar Lampung.

Kota Metro dengan jumlah penduduk ± 151.078 jiwa yang tersebar pada 5 (lima) Kecamatan dan 22 (duapuluh dua) Kelurahan. Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Kecamatan yang wilayahnya paling luas adalah Kecamatan Metro Utara seluas 19,64 km² atau 28,57 % dari luas total Kota Metro. Sementara Kecamatan lainnya memiliki luas wilayah antara 17% sampai 21% terhadap luas seluruh kota. (sebagaimana pada Tabel 2.1)

Kota Metro memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan 0 – 12 % namun rata-rata kemiringan 0 -25 %, sedangkan daerah yang berbukit/bergelombang terletak di sebelah Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Kibang Lampung Timur.

Penggunaan Lahan

Sampai dengan tahun 2007 luas lahan sawah di Kota Metro seluas 2.616,25 ha yang terdiri dari :

1. Dapat ditanami tanaman padi 1 kali tanam seluas 213 ha (9 %).
2. Dapat ditanami tanaman padi 2 kali tanam seluas 2403,25 ha (91 %).

Lahan kering di Kota Metro seluas 3.993,78 ha yang terdiri dari lahan pekarangan, tegalan/ ladang dan lain-lainnya. Lahan tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan. Tanaman yang dominan di Kota Metro adalah padi, jagung dan tanaman hortikultura dataran rendah.

Tabel 2. 1. Luas Administrasi Kota Metro Per Kecamatan

Kabupaten/Kota : Metro
 Provinsi : Lampung
 Tahun data : September 2008

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Jiwa	Jumlah LK
1.	Metro Pusat	1. Metro	2,28	13.455	9
		2. Imopuro	1,19	10.083	6
		3. Hadimulyo Timur	3,37	7.588	6
		4. Hadimulyo Barat	1,50	15.892	9
		5. Yosomulyo	3,37	9.053	5
			11,71	56.061	35
2.	Metro Utara	1. Banjar Sari	5,75	8.338	9
		2. Purwosari	2,25	5.104	7
		3. Purwoasri	3,62	3.600	4
		4. Karang Rejo	7,72	7.605	11
			19,64	24.647	31
3.	Metro Selatan	1. Rejomulyo	4,75	3.733	7
		2. Margorejo	2,46	4.074	6
		3. Margodadi	2,87	3.596	6
		4. Sumber Sari	4,25	4.181	4
			14,33	15.584	23
4.	Metro Timur	1. Iring Mulyo	1,89	12.203	8
		2. Yosodadi	3,36	6.804	4
		3. Yosorejo	1,22	7.260	9
		4. Tejosari	3,76	2.639	4
		5. Tejo Agung	1,55	4.699	5
			11,78	33.605	30
5.	Metro Barat	1. Mulyo Jati	2,95	4.497	6
		2. Mulyo Sari	3,03	3.918	5
		3. Ganjar Agung	2,88	5.590	5
		4. Ganjar Asri	2,42	7.176	5
			11,28	21.181	21
		Total	68,74	151.078	140

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Metro

Kondisi Iklim

Kota Metro beriklim tropis sebagaimana halnya dengan kondisi iklim di wilayah Propinsi Lampung pada umumnya secara terinci kondisi iklim di Kota Metro adalah sebagai berikut :

- Arus Angin

Kota Metro terletak di garis khatulistiwa pada posisi 5⁰ Lintang Selatan yang beriklim humid tropis, dengan arah angin laut yang bertiup dari samudra Indonesia dan Laut Jawa. Pada bulan November sampai Maret angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut. Sedangkan pada bulan Juli sampai Agustus bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin pada umumnya rata – rata 5.83 km/jam.

- Temperatur dan Kelembaban Udara
Pada ketinggian antara 40 – 62 meter dari permukaan laut, temperatur udara rata-rata berkisar 26⁰ C - 30⁰ C, dengan suhu udara rata-rata siang hari 28⁰ C kelembaban udara rata-rata berkisar antara 80 % - 88 %.
- Curah Hujan
Rata-rata curah hujan Kota Metro adalah antara 1.921,07 mm pertahun sejak tahun 2005 – 2003. Bulan hujan berkisar antara bulan September sampai bulan Mei dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari sampai bulan Maret sedangkan bulan kering terjadi pada bulan Juni sampai Agustus.

Proporsi Kawasan terbangun sebesar 37,20% dari luas wilayah atau 2.557,13 hektar, sedangkan kawasan tidak terbangun sebesar 62,80% atau 4.316,88 hektar, perkembangan kawasan permukiman terjadi kesegala arah, namun mengingat prasarana dan sarana essensial lebih banyak dibangun di bagian Barat dan Selatan mengakibatkan arah perkembangan kota cenderung berkembang ke arah Barat dan Selatan kota.

Prosentase terbesar kawasan terbangun adalah sebagai pusat permukiman yang meliputi luas lahan sebesar 2.401,44 ha atau 34,94 % dari luas wilayah, sedangkan lainnya merupakan lokasi fasilitas dah raga dan rekreasi, taman, hutan kota, tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, kesehatan, perdagangan, hotel, restoran, dan aneka industri menengah dan kecil.

Pusat pemukiman penduduk tersebut tersebar hampir merata di wilayah kecamatan dengan luas kawasan permukiman paling tinggi berada di Kecamatan Metro Pusat (673,18 ha) dan paling rendah berada di Kecamatan Metro Timur (283,61 ha), sementara lahan terbangun non pemukiman paling luas terletak pada Kecamatan Metro Pusat (60,73 ha) dan paling rendah berada di Kecamatan Metro Barat (11,72 ha).

Kawasan tidak terbangun di Kota Metro didominasi oleh persawahan dengan sistem irigasi teknis yang mencapai 2.616,25 ha atau 38,06 % dari luas total wilayah, selebihnya adalah lahan kering pekarangan sebesar 3.001,73 ha. Tegalan 266,9 ha dan sawah non irigasi sebesar 45 ha. Areal sawah irigasi teknis yang paling luas berada di Kecamatan Metro Selatan (784,25 ha) dan paling rendah berada di Kecamatan Metro Pusat (224 ha). Persawahan baik teknis maupun non teknis dapat berkembang dengan baik karena didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai seperti pengairan teknis, ½ teknis, sederhana PU, Non PU atau tadah hujan

BAB III

AIR

Kota Metro yang dibatasi aliran 2 (dua) sungai , masing-masing sungai Way Sekampung pada batas bagian Selatan Kota Metro dengan Kecamatan Metro Kibang dan Way Raman sebagai batas antara Kota Metro dengan Kecamatan Punggur di sebelah Utara, selain itu di dalam wilayah Kota Metro terdapat 2 (dua) sungai yaitu Way Batanghari dan Way Bunut. Pada musim kemarau debit air Way Batanghari mencapai 9 – 10 m³/detik dan pada musim hujan debitnya mencapai 500 l/detik, sedangkan Way Bunut pada musim kemarau debitnya mencapai 5 – 6 l/detik dan pada musim hujan debitnya mencapai 100 – 200 l/detik.

Air merupakan sumber daya yang mutlak dibutuhkan untuk kehidupan dan aktifitasnya, ketidakseimbangan antara ketersediaan air bersih dengan jumlah penduduk dan tingkat permintaannya membutuhkan suatu kearifan dalam penggunaan sumber daya alam tersebut secara alami. Sumber daya air termasuk sumber daya yang dapat diperbaharui, namun dalam kasus-kasus tertentu sumber daya ini mengalami perubahan potensi menjadi sumber daya alam tak terbaharui.

Wilayah Kota Metro yang dilalui oleh saluran irigasi teknis dengan berbagai jenis saluran, mulai dari saluran primer hingga saluran tersier. Sebagian besar wilayah Kota Metro masih merupakan kawasan persawahan irigasi teknis terutama di wilayah bagian Selatan dan Utara, hal tersebut menggambarkan bahwa sumber daya air mempunyai arti sangat penting bagi masyarakat.

Dalam hal kebutuhan air bersih sebagian masyarakat dipenuhi kebutuhannya dari saluran air yang diselenggarakan dan dikelola oleh PDAM Kota Metro namun belum seluruh wilayah kota dapat dilayani/ dipenuhi kebutuhannya. Pada umumnya masyarakat Kota Metro menggunakan sumur timba atau pompa tangan atau pompa listrik.

BAB IV UDARA

Sumber Daya Udara

Udara merupakan salah satu unsur alam yang pokok bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi terutama manusia, tanpa udara yang bersih maka manusia akan terganggu terutama keselamatannya yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Kualitas udara dari suatu daerah ditentukan oleh daya dukung dalam daerah tersebut, serta jumlah sumber pencemaran atau beban pencemaran dari sumber yang ada.

Kota Metro yang tidak memiliki industri – industri berskala besar dan kegiatan industri yang tidak menimbulkan dampak pencemaran udara. Sedangkan beban pencemaran dari sumber bergerak adalah kendaraan bermotor dengan polutan berupa Karbon Monoksida dan polutan berupa Hidro Karbon masih diambang batas normal artinya beban pencemaran dari transportasi kota masih relatif rendah

Pengendalian pencemaran udara adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk menurunkan jumlah dan kadar pencemaran.

Secara umum kondisi kualitas udara di Kota Metro masih relatif baik. Upaya pencegahan dan mempertahankan kondisi terus dilakukan dengan mempertahankan pelestarian lingkungan.

Kegiatan pengendalian pencemaran udara juga dilakukan melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah Kota Metro tentang Lingkungan Hidup. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan dunia usaha, terutamapada industri yang dalam proses produksinya berpotensi besar menyebabkan pencemaran udara.

Upaya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh berbagai pihak yang melibatkan seluruh komponen masyarakat merupakan langkah nyata.

Untuk terlaksananya program pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Metro dalam menjaga kualitas udara

a. Peran Pemerintah Daerah

- Pengendalian pada tahap pencemaran yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku pencemar udara dan upaya pengendalian oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan.
- Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman hutan kota serta penyelamatan jalur hijau di wilayah perkotaan sebagai paru – paru kota.
- Penertiban kendaraan bermotor yang tidak layak jalan
- Pemantauan secara berkala dan pengujian kualitas udara pada lalu lintas sebagai bahan evaluasi terhadap kemungkinan dilakukan pola penanganan dan penanggulangan bila terjadi penyimpangan dari ambang batas yang ditoleransi.
- Pemberian sanksi hukum yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

- b. Peran serta masyarakat dan mitra lingkungan
 - Mendukung program pemerintah melalui peran sertanya dalam langkah-langkah sosialisasi di lingkungannya dengan pemahaman dan ketaatannya terhadap kelestarian lingkungan.
 - Mendukung dan menyukseskan program pemerintah dalam pelaksanaan uji emisi gas buang kendaraan bermotor di wilayah kota.

BAB V

LAHAN DAN HUTAN

Sampai dengan Tahun 2007 luas lahan pertanian di Kota Metro seluas 2.616,25 Ha. Yang terdiri dari :

1. Dapat ditanami tanaman padi satu kali tanam seluas 213 Ha (9%)
2. Dapat ditanami padi 2 kali tanam seluas 2403,25 Ha (91 %).

Lahan kering di Kota Metro seluas 3.993,78 Ha yang terdiri dari lahan pekarangan, tegalan, ladang dan lain-lain. Lahan tersebut dapat digunakan kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan.

Tanaman yang dominan di Kota Metro adalah padi, jagung dan tanaman hortikultura dataran rendah. Sedangkan untuk lahan kehutanan di Kota Metro hanya ada hutan kota yang mempunyai luas 13,2 ha yang terdiri dari hutan kota linara, hutan kota stadion, hutan kota terminal 16c, hutan kota Tesarigaga yang kesemuanya merupakan sebagai paru-paru Kota Metro.

BAB VI

KEANEKARAGAMAN HAYATI

Kota Metro yang mempunyai luas 68,74 km² dan berada ditengah-tengah wilayah Propinsi Lampung mempunyai keanekaragaman hayati disektor pertanian tanaman pangan dan pada umumnya penggunaan lahan didominasi kepada tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar), tanaman hortikultura (sayur-sayuran seperti : bawang daun, kacang panjang, cabai, tomat, terung, buncis, ketimun, kangkung, bayam, sawi) dan tanaman buah-buahan tahunan seperti mangga, rambutan, durian, alpukat, sawo, pisang dan lain-lain.

Keanekaragaman hayati disektor peternakan (fauna) di Kota Metro meliputi : sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, itik, burung puyuh, disektor perikanan meliputi ikan lele, patin, gurame, ikan mas, ikan nila, kebanyakan ikan diperoleh dari hasil kolam - kolam yang dikelola oleh kelompok-kelompok tani yang dibina oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat umum.

BAB VII

LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Berdasarkan kajian pemanfaatan tata ruang Kota Metro penyebaran kawasan terbangun di kota ini lebih cenderung membentuk pola grid atau kurva linier dimana kawasan pemukiman membentuk suatu pola kota dengan pembatasan berupa jaringan jalan. Pada ini terjadi disemua kawasan kecamatan yang ada di Kota Metro. Secara kecenderungan terjadi pertumbuhan kota dengan pola yang didukung oleh kondisi fisik yang relatif datar, sehingga sangat cocok untuk berbagai kegiatan perkotaan seperti jasa, perdagangan, pemukiman dan pemerintahan. Dengan kondisi yang terjadi pada saat ini perkembangan pertumbuhan dengan karakteristik kegiatan yang berbeda berdasarkan hasil kajian, penggunaan lahan terutama di Kecamatan Metro Pusat dimanfaatkan secara efektif untuk kegiatan perkotaan meliputi kegiatan pemukiman, perdagangan dan jasa, pemerintahan serta berbagai fasilitas pelayanan lainnya, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk pertanian karena adanya dukungan irigasi.

Prosentase terbesar kawasan terbangun adalah sebagai pusat permukiman yang meliputi luas lahan sebesar 2.401,44 ha atau 39,94 % dari luas wilayah, sedangkan lainnya merupakan lokasi fasilitas dah raga dan rekreasi, taman, hutan kota, tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, kesehatan, perdagangan, hotel, restoran, dan aneka industri menengah dan kecil.

Pusat pemukiman penduduk tersebut tersebar hampir merata di wilayah kecamatan dengan luas kawasan permukiman paling tinggi berada di Kecamatan Metro Pusat (673,18 ha) dan paling rendah berada di Kecamatan Metro Timur (283,61 ha), sementara lahan terbangun non pemukiman paling luas terletak pada Kecamatan Metro Pusat (60,73 ha) dan paling rendah berada di Kecamatan Metro Barat (11,72 ha) sebagaimana pada lampiran 2. Kawasan tidak terbangun di Kota Metro didominasi oleh persawahan dengan sistem irigasi teknis yang mencapai 2.616,25 ha atau 38,06 % dari luas total wilayah, selebihnya adalah lahan kering pekarangan sebesar 3.001,73 ha. Tegalan 266.9 ha dan sawah non irigasi sebesar 45 ha. Areal sawah irigasi teknis yang paling luas berada di Kecamatan Metro Selatan (784,25 ha) dan paling rendah berada di Kecamatan Metro Pusat (224 ha).

BAB VIII

AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya salah satu kegiatan untuk melestarikan dan mempertahankan lingkungan hidup Kota Metro, Pemerintah Daerah Kota Metro pada Bidang Lingkungan hidup mempunyai agenda sebagai berikut :

1. Program pengelolaan lingkungan hidup Kota Metro.
2. Program pemulihan kualitas lingkungan
3. Program pembinaan dan pengawasan industri, peternakan dan rumah potong hewan, Rumah Sakit, Rumah Bersalin.
4. Program pembinaan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup.
5. Program evaluasi dokumen Amdal, UKL dan RPL
6. Program peningkatan aparatur Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup.
7. Program sosialisasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
8. Program pembinaan sekolah Adiwiyata.
9. Program Adipura.
10. Program Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro, 2004, Laporan Akhir Penyusunan Plan Persampahan dan Air Limbah Ibukota Kabupater/ Kota Baru Sumbagsel, Metro Lampung.
3. Bapedalda Propinsi Lampung, 2005, Status Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung, Bandar Lampung.
4. Bappeda Kota Metro, 2005, Renstra Kota Metro Tahun 2005- 2009, Metro Lampung.
5. Dinas Tata Kota dan Lingkungan hidup Kota Metro, 2005, Rencana Detail Tata Ruang Kota (RD TRK) Kecamatan Metro pusat Kota Metro Tahun 2005 – 2015, Metro Lampung.
6. Dinas Tata Kota dan Lingkungan hidup Kota Metro, 2005, Rencana Detail Tata Ruang Kota (RD TRK) Kecamatan Metro pusat Kota Metro Tahun 2005 – 2015, Metro Lampung.
7. Badan Pusat statistik Kota Metro, 2007, Metro Dalam Angka, Metro Lampung.
8. Dinas Pertanian Kota Metro, 2007, Potensi dan Sentra Pertanian di Kota Metro, Metro Lampung.
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Metro, 2007, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam Angka, Metro Lampung.
10. Kementerian Lingkungan Hidup, 2007, Perlakuan Bumi dengan Cinta, Buku Saku Piagam Bumi, Yayasan Lenting dan Proyek Iden, Jakarta